

NASIONALISASI PABRIK GULA SRAGI DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 1957-1967

THE NATIONALIZATION OF SRAGI SUGAR FACTORY IN PEKALONGAN REGENCY 1957-1967.

Oleh: Kurnia Yuliasih, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, kyuliasih86@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan pengaruh nasionalisasi terhadap Pabrik Gula Sragi di Kabupaten Pekalongan tahun 1957-1967. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis yang menggunakan empat tahapan penelitian, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pabrik Gula Sragi yang didirikan pada tahun 1837 memiliki peranan yang penting pada perekonomian Kabupaten Pekalongan. Nasionalisasi yang dilakukan pada tahun 1957 menimbulkan dampak yang besar pada Pabrik Gula Sragi. Perubahan terjadi pada manajemen pabrik dari yang semula dipegang oleh orang-orang Belanda kemudian dipegang langsung oleh orang Indonesia. Penurunan produksi gula terjadi akibat kekurangan bahan baku selama masa inflasi serta kurangnya tenaga ahli dalam pengoperasian mesin pabrik yang merupakan peninggalan Belanda. Masalah lain yang berkaitan dengan tenaga kerja pasca nasionalisasi yaitu mengenai kesenjangan upah buruh yang semuanya merupakan orang Indonesia. Mereka membentuk serikat buruh untuk melindungi hak dan kewajiban yang mereka miliki.

Kata kunci: *Pabrik Gula, Sragi, Pekalongan*

Abstract

The purpose of this study was to determine the process and effect of nationalization on the sragi sugar factory in pekalongan regency in 1957-1967. This study uses a critical historical research method that uses four stages of research, namely: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the Sragi Sugar Factory which was established in 1837 has an important role in the economy of Pekalongan Regency. The nationalization carried out in 1957 had a large impact on the Sragi Sugar Factory. Changes occurred in the factory management from what was originally held by the Dutch people and the directly held by the Indonesian people. The decline in sugar production occurred due to a shortage of raw materials during the inflation periode and the lack of expertise in the operation of factory machinery which is a Dutch heritage. Another problem related to post-nationalization labour is about the wage gap of workers who are all Indonesian. They form trade union to protect the right and obligations they have.

Keywords : *Sugar Factory, Sragi, Pekalongan*

PENDAHULUAN

Industri gula di Jawa berkembang pesat pada masa tanam paksa (*culturstesel*) pada tahun 1830-1970. Sistem tanam paksa para petani diharuskan menanam tanaman tebu diatas tanah mereka dan hasil panen dari apa yang mereka tanam tersebut harus diserahkan kepada pemerintah sebagai pengganti pembayaran pajak bumi.¹

Sistem tanam paksa mampu meningkatkan hasil perkebunan tebu dan menjadikan Indonesia sebagai produsen gula sehingga banyak permintaan gula untuk pasar luar negeri maka pihak Pemerintah Belanda mengadakan perluasan perkebunan tebu. Perluasan perkebunan tebu ini jelas menghambat produksi pangan lain, khususnya bagi produksi beras. Industri gula mengeksploitasi tanah dan industri tenaga kerja. Industri gula menyewa banyak angkatan kerja dengan dasar yang sederhana dari penduduk pedesaan Jawa. Pabrik gula menyewa tanah untuk tempat penanaman tebu yang dikelola secara langsung, sehingga dapat terlihat adanya rotasi antara gula dengan beras dan tanaman petani yang lain.²

Perkembangan gula di Jawa sangat didukung oleh iklim dan tanah di Jawa yang cocok untuk tanaman tebu. Pasca Revolusi Industri di Eropa Barat, Belanda membawa teknologi berupa mesin uap yang dapat digunakan untuk menggerakkan industri penggilingan pada skala yang besar. Setelah periode mekanisasi tersebut, industri gula menduduki sektor terdepan bagi perekonomian di Pulau Jawa.

Sistem tanam paksa berakhir pada tahun 1870 dengan dikeluarkannya Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870. Undang-Undang Agraria pada dasarnya berisi dua pokok, yaitu memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan swasta yang berkembang di Hindia Belanda, disamping melindungi hak rakyat atas tanahnya. Aturan ini diberikan untuk kepentingan kapital kolonial, yang kemudian menjadi landasan kepemilikan dan hubungan kerja di perkebunan dan agraria.

Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi perusahaan perkebunan untuk menguasai ratusan hektar tanah dan menciptakan kondisi bagi akumulasi kapital dengan cara melemahkan kontrol masyarakat atas sumber produksi.³ Pada saat itu Pemerintah Kolonial mulai membuka kesempatan bagi investor swasta untuk menjalankan usahanya di Hindia Belanda. Usaha yang banyak diminati oleh para usahawan asing ini adalah industri perkebunan, terutama gula. Pemerintahan

¹ Mubyarto, Dkk, *Tanah Dan Tenaga Kerja Perkebunan Di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 17

² J. Thomas Linblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru, Terj. Bambang Purwanto, dkk* (Jakarta : LP3S, 1998), hlm. 28.

³ Ahmad Nashih Luthfi, Dkk. *Kronik Agraria Indonesia*. (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, 2011), hlm. 6.

kolonial mengembangkan sektor perkebunan sehingga dalam waktu yang singkat jumlah perkebunan semakin bertambah terutama di daerah Jawa.

Perkembangan industri gula pada masa selanjutnya terus mengalami pasang surut. Pengambilalihan wilayah Indonesia oleh tentara Jepang pada tahun 1942 turut memberikan dampak dalam perkembangan industri gula. Jepang mengalihfungsikan pabrik-pabrik gula yang masih tersisa di Indonesia untuk gudang militer. Pemerintah Jepang kurang mengembangkan industri gula, kegiatan pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang, bahkan instalasi pabrik gula dibongkar dan besinya diambil untuk dibawa ke negara Jepang.⁴

Masa kemerdekaan membawa Indonesia menuju keadaan yang baru. Pembinaan terus dilakukan, termasuk dalam bidang ekonomi. Perhatian besar terhadap pengembangan ekonomi nasional sendiri baru muncul pada tahun 1951. Gagasan untuk mulai membangun ekonomi nasional diprakarsai oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Beliau berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Langkah yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.⁵

Pendapat ini melatarbelakangi adanya berbagai program pengembangan ekonomi Indonesia secara mandiri dalam kabinet pemerintahan Indonesia.

Sebagai salah satu perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia, Pabrik Gula Sragi memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proses dan pengaruh nasionalisasi terhadap Pabrik Gula Sragi di Kabupaten Pekalongan tahun 1957-1967.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah adalah menguji dan menalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode sejarah kritis terdiri dari empat tahap penelitian, yaitu:

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber-sumber yang digunakan untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah.⁶ Pengumpulan sumber dalam penelitian ini dilakukan di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, perpustakaan pusat Universitas Negeri Yogyakarta, perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, perpustakaan pusat Universitas Gadjah Mada.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber yang digunakan baik terhadap

⁴ *Ibid.*, hlm.72

⁵ Tim Penyusun Sejarah Nasional, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2010), hlm. 30.

⁶ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak 2007), hlm. 67.

bahan materi (ekstern) sumber maupun terhadap substansi (isi) sumber. Kritik sumber dibedakan menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.⁷

Kritik esktern merupakan kritik terhadap keaslian atau autentisitas sumber yang dilakukan dengan cara pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sebuah sumber sejarah. Setelah memastikan keaslian sumber, kemudian dilanjutkan dengan kritik intern untuk menentukan kredibilitas atau kebenaran substansi sumber yang diperoleh. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan kesaksian antar berbagai sumber. Hasil dari tahap ini adalah fakta sejarah yang dapat digunakan sebagai bahan untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah.⁸

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran yang dilakukan oleh seorang sejarawan terhadap data-data yang sudah terseleksi. Penafsiran sering dijadikan pemicu dari subjektifitas, sebagian itu benar tetapi sebagian salah. Tujuan dari interpretasi adalah menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh setelah diterapkan kritik ekstern maupun kritik intern dari data-data yang didapatkan sehingga memberikan kesatuan berupa bentuk peristiwa lampau.⁹

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2005), hlm. 12.

⁸ Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 7.

⁹ Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, a.b.

4. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah adalah langkah terakhir dari penulisan karya sejarah, rekonstruksi masa lampau yang tersusun secara sistematis, bulat, dan jelas dalam bentuk cerita sejarah.¹⁰ Beberapa prinsip yang harus dipegang penulis selama proses ini antara lain: prinsip strelialisasi yang didalamnya memerlukan prinsip-prinsip seperti prinsip kronologi, prinsip kausalitas dan bahkan kemampuan imajinasi atau kemampuan menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian yang masuk akal dan mampu dipahami pembaca.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan merupakan wilayah administratif yang terletak di kawasan Pantai Utara Jawa atau biasa disebut Pantura. Secara topografis, Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara tanah datar dan pegunungan. Wilayah tanah darat meliputi 12 kecamatan, yaitu Tirto, Wiradesa, Bauran, Kedungwuni, Bojong, Sragi, Kesesi, Kajen, Wonopringgo, Karanganyar, Doro, dan Talun. Di kecamatan Sragi dan Kesesi terdapat perkebunan tebu yang merupakan bagian dari

Nugroho Notosusanto, *"Mengerti Sejarah"*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 34.

¹⁰ Helius Sjamsuddin dan H. Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1996), hlm. 12.

kawasan industri gula Sragi.¹¹ Empat kecamatan lainnya, yaitu Lebakbarang, Petungkriyono, Paninggaran dan Kandangserang yang berada di bagaian selatan berupa dataran tinggi.

Kecamatan Petungkriyono yang berada anantara 600 sampai 2.100 meter di atas permukaan laut merupakan bagian dari dataran tinggi Pegunungan Serayu Utara. Sebelah selatan merupakan kawasan Dataran Tinggi Dieng, dengan rangkaian Gunung Rogojembangan, Gunung Kendalisodo, Gunung Sikeru, Gunung Perbata, Gunung Geni, dan Gunung Kukusan. Daerah ini juga merupakan hulu dari tiga sungai besar yaitu Sungai Wola, Sungai Sengkarang, dan Sungai Kupang atau Sungai Pekalongan. Di daerah dataran ini terdapat perkebunan teh Kaliboja yang berada di kecamatan Paninggaran.

Perekonomian kabupaten Pekalongan utamanya ditopang oleh sektor perdagangan dan perikanan. Kondisi geografis Pekalongan sebagai kota pesisir sangat mendukung dua sektor ekonomi tersebut. Keberadaan sungai sebagai sarana lalu lintas dan pelabuhan tempat kapal-kapal bersandar menjadi bagian vital dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kemajuan kota ini juga dimulai dari pembangunan Sungai Kupang atau Sungai Pekalongan sebagai pangkalan pelabuhan dagang antar pulau dan sebagai sarana lalu lintas yang menghubungkan daerah pedalaman

dan daerah pesisir.¹² Salah satu komoditas perdagangan penting yang dihasilkan Pekalongan adalah gula. Gula menjadi kekuatan pendorong tumbuhnya perekonomian Kabupaten Pekalongan. Tanaman tebu telah dikenal oleh penduduk Pekalongan jauh sebelum pabrik gula dibuka di daerah ini. Penduduk Pekalongan menanam tebu di lahan mereka untuk menyuplai pabrik gula yang ada di Pemalang, yaitu pabrik Batang dan Bojongkelor. Pada akhir abad ke-18, ketika industri gula mengalami kelesuan yang mengakibatkan banyak pabrik ditutup, Pekalongan mampu bertahan dengan penggilingan tebu yang dimiliki Tan Jan Ko, seorang kapitan Cina asal Semarang.

Berdirinya Pabrik Gula Sragi

Industri gula di Jawa semula dikelola oleh orang-orang Tionghoa di dataran rendah Batavia pada pertengahan abad ke-17. Penggilingan tebu di daerah tersebut didanai oleh VOC dan pengusaha Tionghoa. Pada tahun 1660, jumlah usaha penggilingan tebu mengalami penyusutan akibat persaingan dagang dengan Inggris dan mundurnya VOC dari perdagangan gula.

Usaha penggilingan tebu yang dikelola orang-orang Tionghoa ini tetap bertahan dan mengalami peningkatan. Pada awal abad ke-18, jumlah penggilingan tebu di Jawa berjumlah 130 buah, 37 diantaranya berada di pesisir pantai utara Jawa. Kebanyakan pabrik berlokasi

¹¹ Raminah Baribin (dkk), *Geografi Dialek Bahasa Jawa, Kabupaten Pekalongan*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987), hlm. 10.

¹² Kusnin Asa, *Batik Pekalongan Dalam Lintasan Sejarah*, (Pekalongan: Komunitas Pecinta Batik Pekalongan, 2006), hlm. 21.

di antara Jepara, Pati, dan Kudus. Pada saat itu di wilayah antara Tegal dan Pekalongan masih jarang ada pabrik gula. Hanya ada dua pabrik gula, yaitu di kabupaten Batang dan Bojongkelor, termasuk wilayah kabupaten Pemalang. Beberapa masa kemudian muncul pabrik gula lain di Babakulan atau Bakulan yang terletak di daerah tepian Sungai Comal.¹³

Jumlah pabrik gula di wilayah pesisir Jawa ketika itu belum berkembang pesat. Jumlahnya tidak banyak, perkembangannya naik turun bahkan mencapai jumlah terendah pada tahun 1755, yaitu hanya tinggal tujuh pabrik yang beroperasi. Salah satu diantaranya yang berlokasi di Batang. Melihat perkembangan yang kurang baik itu, maka penguasa pusat mengeluarkan dekret bahwa pabrik-pabrik di Batang harus terus berjalan karena area itu menghasilkan gula tebu dengan kualitas yang baik.

Pada akhir abad ke-18, tepatnya pada tahun 1794, di daerah pesisir utara Jawa terdapat 27 pabrik gula, dua diantaranya di wilayah Pekalongan, yaitu Batang dan Bakulan. Pada tahun 1801, jumlah pabrik gula di pesisir utara Jawa bertambah lagi menjadi 31 pabrik, tiga diantaranya berada di Pekalongan-Batang. Peranan pengusaha Cina dalam industri gula di Pekalongan terus berlangsung sampai tahun 1820.¹⁴

Sejak tahun 1830 di Pekalongan terdapat tiga buah pabrik gula yang beroperasi untuk menggiling tebu-tebu *gubernemen*, dua diantaranya dioperasikan oleh orang-orang Tionghoa, yaitu oleh Gou Kan Tjou di desa Wonopringo dan Tan Hong Jan di desa Klidang. Sedang yang ketiga dioperasikan oleh Alexander Loudon, seorang bekas pedagang besar Inggris yang dilibatkan kerja administratif dalam kurun pasca Raffles.¹⁵ Loudon menjadi *fabriekant* di pabrik gula Karanganyar, kabupaten Pemalang. Namun informasi mengenai ketiga pabrik gula tersebut sangat terbatas. Sekitar tahun 1837-1838 didirikan pabrik gula modern di Pekalongan yaitu Wonopringo, Sragi, Kalimati.

Pembangunan Pabrik Gula Sragi disetujui pada tahun 1836 dan dimulai pada tahun 1837 di atas lahan seluas 141.170 meter persegi untuk bangunan pabrik dan lahan sawah untuk tebu seluas 400 *bau*. Pembangunan pabrik ini menggunakan dana dari *Javasche Courant* yang diinvestasikan melalui *gubernemen* sebesar 50.000 gulden. A. Zicsel, sebagai perancangannya merealisasikan pabrik Sragi tersebut dengan dana terbatas, bahkan ia sendirilah yang kemudian menjadi administraturnya. Pabrik ini kemudian dikelola

¹³ Peter Boomgard, "Selayang Pandang Perkembangan Ekonomi dan Sosial Daerah Comal Periode 1750-1940", dalam *Di Bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad ke-20*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 21.

¹⁴ Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Dari Industri Gula Hingga Batik Pekalongan:*

Sejarah Sosial Ekonomi Pantai Utara Jawa pada Masa Kolonial Belanda, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017), hlm. 39-40.

¹⁵ Noel Deerr, *The History of Sugar*, (London: Chapman and Hall Ltd., 1949), hlm. 222.

oleh *NV Cultuur Mij De Maas* dan memproduksi gula mangkok putih.¹⁶

Tenaga kerja direkrut oleh *gubernemen* dari kalangan petani lokal menggunakan bantuan elit pribumi. Secara resmi petani diserap melalui mekanisme kerja berdasarkan kontrak gula atau *suiker-contract*. Selain itu, *gubernemen* berkewajiban membuat perjanjian dengan *fabriekant*, dengan memberi jaminan pada pabrik-pabrik untuk penyediaan tebu.¹⁷ *Gubernemen* juga memonopoli perdagangan gula ke Eropa melalui NHM. Dengan demikian, tugas *fabriekant* sebagai partner *gubernemen* dalam industri gula hanya sebatas pada pelaksana kerja pengepresan tebu.

Gagasan nasionalisasi dilatarbelakangi keinginan untuk mulai membangun ekonomi nasional. Hal ini diprakarsai oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Beliau berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Langkah yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.¹⁸ Selain itu, memburuknya hubungan antara Indonesia dengan Belanda

semakin memperkuat dorongan untuk melakukan nasionalisasi.

Proses Nasionalisasi Pabrik Gula Sragi

Pada masa perang kemerdekaan 1947-1948, banyak pabrik gula yang dibumihanguskan oleh gerilyawan Republik Indonesia agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Pengakuan Belanda terhadap keaulatan Republik Indonesia disepakati dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Keamanan dalam negeri yang berangsur-angsur pulih membuka kesempatan bagi pengusaha Belanda yang bergerak dalam industri gula untuk kembali berproduksi.

Hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang kembali memanas setelah Kabinet Burhanudin Harahap membatalkan hasil KMB secara sepihak. Indonesia mengambil sikap tegas setelah resolusi yang disampaikan dalam sidang Majelis Umum PBB pada November tahun 1957 mengenai permasalahan Irian Barat tidak mendapatkan dukungan.¹⁹ Belanda beralasan bahwa pemerintah Indonesia belum memiliki kemampuan menyediakan sarana yang memadai bagi masyarakat Irian Barat.

Salah satu hasil yang disepakati dalam KMB adalah pemerintah Indonesia harus mengizinkan pihak-pihak swasta Belanda untuk tetap menjalankan kegiatan perekonomian di Indonesia. Setelah hasil KMB tidak diakui, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih

¹⁶ Edi Cahyono, *Pekalongan 1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan*, (Edi Cahyono's Experience, 2005), hlm. 72.

¹⁷ Adisewojo, 1971, *Bertjotjok Tanam Tebu*, (Bandung: Sumur, 1971), hlm. 8.

¹⁸ Tim Penyusun Sejarah Nasional, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2010), hlm. 30.

¹⁹ Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 29.

seluruh perusahaan Belanda yang ada di Indonesia terhitung sejak tanggal 3 Desember 1957.²⁰ Seluruh perusahaan yang berhasil diambil alih dari tangan Belanda kemudian berada di bawah pengawasan militer.

Berdasarkan Undang-undang Nasionalisasi No. 8 tahun 1957, tanggal 10 Desember tahun 1957, dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 229/UM/57 tahun 1957, semua perusahaan Belanda termasuk perkebunan dan pabrik gula diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Tujuan utama nasionalisasi tersebut guna mempermudah pengelolaan, efisiensi, dan meningkatkan produktivitas guna mempertinggi pendapatan keuangan negara. Menyusul tindakan pengambilalihan yang kemudian berubah menjadi penyerahan berbagai perusahaan perkebunan secara resmi kepada militer. Akibatnya, sejak Desember 1957, lebih dari 500 perusahaan perkebunan Belanda, termasuk Pabrik Gula Sragi, telah berada di bawah pengawasan militer Indonesia.

Nasionalisasi terhadap Pabrik Gula Sragi ditetapkan dalam Keputusan Menteri No. 229 /UM/1957 tertanggal 10 Desember 1957. Pabrik Gula Sragi dijadikan Perusahaan Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru) dengan dikepalai Direktur Pusat Perkebunan Negara dan Kepala Jawatan Perkebunan di tingkat pusat. Untuk tingkat provinsi dikepalai oleh seorang Kepala Perwakilan Jawatan Perkebunan Jawa Tengah. Pada masa ini PPN

²⁰ N. B. Wijanarko dan Muryadi, “Nasionalisasi dan Dampaknya Terhadap Pabrik Gula Pajarakan 1956-1960”, dalam *XI News*, (No. 01, Tahun 01, 2015), hlm. 2.

Baru cabang Jawa Tengah membawahi 11 Pabrik Gula yang masing-masing dikepalai oleh seorang administrator.²¹

Berdasarkan PP No. 161 Tahun 1961, Pabrik Gula Sragi ditetapkan sebagai PPN kesatuan Jawa Tengah II. Dua tahun setelahnya, melalui Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1963 Pabrik Gula Sragi diubah menjadi menjadi Perusahaan Perkebunan Gula Negara atau PPN-Gula. Peraturan Pemerintah tersebut juga menyatakan tugas PPGN meliputi penyelenggaraan produksi gula dan usaha-usaha sampingan yang berkaitan dengan bidang tersebut.

Selain itu perusahaan juga berkewajiban memberi bimbingan dan bantuan dibidang usaha memperbaiki mutu dan hasil tanaman tebu rakyat. Berdasarkan peraturan ini, Pabrik Gula Sragi telah berdiri menjadi perusahaan milik negara dan mendapatkan modal dari pemerintah pusat. Pemberian modal ini menunjukkan adanya perhatian besar yang diberikan oleh pemerintah terhadap sektor pergulaan nasional. Modal utama pabrik gula yang dulunya berasal dari investasi asing mulai dihapus dan diganti dengan modal dari pemerintah. Modal ini disediakan oleh pemerintah dari Bank Indonesia (BI) dan disalurkan oleh Menteri Pertanian.²²

Permodalan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masing-masing

²¹ Suhartono, *Sejarah Berdirinya PTP XV-XVI*, (Solo: Balai Pustaka, 1986), hlm. 98.

²² Retno Puji Lestari, “Nasionalisasi Industri Gula di Madiun: Pabrik Gula Pagottan, Kanigoro, dan Redjo Agung Baru Tahun 1950-1966”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 66.

perusahaan gula berbeda-beda, tergantung dari seberapa besar produksi pabrik-pabrik gula tersebut sebelumnya. Modal yang diberikan pada Pabrik Gula Sragi ditetapkan sebesar Rp. 121.000.000.²³ PPGN dipimpin oleh direktur yang diangkat oleh Menteri dengan masa jabatan selama lima tahun. Kekuasaan direktur PPGN diatur dalam Peraturan Menteri berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp. Tahun 1960. Seorang direktur bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian dan Badan Pimpinan Umum (BPU).

Pada tahun 1967, Pabrik Gula Sragi memiliki pegawai sebanyak 586 orang, ditambah dengan buruh non pegawai mencapai 4.082 orang.²⁴ Berikut data produksi Pabrik Gula Sragi.

Produksi Gula Kristal Putih Pabrik Gula Sragi Tahun 1963-1967

Tahun	Produksi Gula Kristal (kg)
1963	28.277.079
1964	22.505.721
1965	22.830.391
1966	22.541.568
1967	23.100.722

Sumber: Kantor Statistik Kodya, *Kodya Pekalongan Dalam Angka 1971*, (Pekalongan: Pemerintah Kota Dati II, 1971), hlm. 196.

Dampak Nasionalisasi Terhadap Pabrik Gula Sragi

Pabrik Gula Sragi dipimpin oleh seorang administrator yang membawahi 4 kepala bagian. Masing-masing adalah Kepala Bagian Tanaman, Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan (TUK), Kepala Bagian Pabrikasi dan Kepala Bagian Instalasi. Di bawah keempat kepala bagian itu masih terdapat beberapa kepala seksi yang berfungsi sebagai staf. Staf masih terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan pertama disebut sebagai pegawai satu yang berjumlah 42 orang. Lapisan kedua dihuni oleh karyawan yang bekerja langsung di pabrik, baik itu di bagian dalam pabrik maupun di lapangan, yang didominasi oleh mandor yang mengepalakan pabrik atau kebun dengan masa pensiun pada usia 59 tahun.²⁵

Pembagian staf menjadi dua lapisan ini jarang dipakai oleh kalangan buruh pabrik, mereka lebih senang menyebut staf perusahaan sebagai karyawan pimpinan dan mereka yang bekerja di lapangan sebagai karyawan pelaksana. Berbeda dengan karyawan pelaksana, maka staf memiliki keistimewaan hak. Keistimewaan ini berupa fasilitas perumahan yang terletak di sebelah selatan pabrik atau tepatnya di seberang jalan depan pabrik.

Buruh Pabrik Gula Sragi terutama untuk kalangan buruh kelas II atau pelaksana bisa mencapai ribuan orang. Mereka terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok yang bekerja secara permanen sepanjang tahun di pabrik (buruh tetap dan buruh harian) dan

²³ Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1963.

²⁴ Dinas Perburuhan Kabupaten Pekalongan Tahun 1968.

²⁵ Ilin Suryantono, “Kondisi Sosial Ekonomi Buruh Pabrik Gula Sragi Kabupaten Pekalongan Pasca G 30 S Tahun 1965-1998”, dalam *Paramita*, (Vol. 20, No. 1, Januari 2010), hlm. 54.

kelompok yang hanya bekerja pada saat musim giling yang sering disebut sebagai buruh kampanye. Buruh kampanye ini hanya melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian seperti memanen tebu, mengangkut tebu hingga ke pabrik dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan pembuatan gula selama musim giling. Jumlah buruh kampanye ini bisa meningkat sampai tiga kali lipat sewaktu panen. Pabrik Gula Sragi menggunakan mandor sebagai alat untuk merekrut pekerja kampanye. Kantong-kantong penyuplai pekerja tebang ini hampir ada di setiap kecamatan. Desa Sidomulyo di Kecamatan Kesesi, Desa Sumub Kidul di Kecamatan Sragi dan Desa Doro di Kecamatan Doro adalah beberapa daerah penyuplai tenaga kerja tebang terbanyak bagi PG Sragi di masa lalu.

Jam kerja dalam Pabrik Gula Sragi setiap tahunnya terbagi menjadi dua periode. Periode pertama adalah periode rehat giling. Waktu kerja yang berlaku adalah 7 jam per hari dan 40 jam per minggu. Periode kedua adalah periode giling, waktu kerja ditambah menjadi 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Pembagian kerja dalam musim giling dibagi atas 3 *shift*, masing-masing adalah: *shift* I 06.30-14.00 wib, *shift* II 14.00-22.00 wib, dan *shift* III 22.00-06.00 wib. Pembagian *shift* ini tidak berlaku bagi karyawan bagian Administrasi dan Umum. Karyawan administrasi dan umum mulai bekerja pada 06.00 wib dan berhenti bekerja pada 14.00 wib.²⁶

Nasionalisasi terhadap perusahaan Belanda juga diikuti oleh pemulangan warga

negara Belanda. Menteri Kehakiman pada awal bulan Desember mengumumkan bahwa 50.000 warga negara Belanda akan diusir atau dipulangkan dalam tiga tahap.²⁷ Tahapan pertama merupakan gelombang warga negara yang tidak memiliki pekerjaan, tahap kedua merupakan golongan menengah, dan tahap ketiga merupakan gelombang untuk mereka yang merupakan tenaga ahli.

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah produksi gula. Para manajer dan teknisi yang merupakan orang-orang Belanda telah kembali ke negaranya. Kepulangan para tenaga ahli dalam industri gula ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pabrik gula. Para pengganti karyawan di pabrik gula belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melanjutkan dan menjalankan produksi pabrik seperti sebelumnya.²⁸

Masalah lain yang berkaitan dengan tenaga kerja adalah upah atau gaji. Pendapatan yang diterima oleh masing-masing mereka yang menduduki strata seperti dijelaskan di atas memiliki perbedaan yang begitu mencolok. Hal ini terjadi karena upah buruh disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten sehingga seringkali terdapat kesamaan antara buruh yang satu dengan buruh yang lain. Besar kecilnya upah untuk masing-masing perusahaan berbeda tergantung pada perusahaan serta jenis industri. Besaran upah pekerja di Pabrik Gula Sragi pada

²⁷ Bondan Kayumonos, *op. cit.*, hlm. 65.

²⁸ Retno Puji Lestari, *op. cit.*, hlm. 80.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

tahun 1965 berkisar antara Rp. 807,26-Rp. 2.251,2.²⁹

Pabrik Gula Sragi membagi karyawan di dalamnya menjadi 3 status berdasarkan cara pengupahannya. Pertama, buruh harian atau borongan yang didominasi oleh buruh di bagian tebang dan angkut yang menerima upah berdasarkan borongan. Upah diterima setiap hari dengan waktu maksimal 1x24 jam dengan mandor dan juru bayar sebagai penanggung jawab utama dalam hal pembayaran. Kedua, buruh kampanye atau *rendengan*. Buruh jenis ini bekerja hanya pada saat musim giling saja. Umumnya mereka bekerja di bagian instalasi dan bagian pengolahan, baik sebagai mekanik ataupun operator mesin. Buruh kampanye ini didominasi oleh para pekerja musiman yang bekerja serabutan apabila tidak sedang musim giling. Pemberitahuan atas mereka biasanya diberitahukan sepuluh hari sebelum masa giling. Buruh kampanye ini menerima upah 2 kali setiap bulannya yaitu pada tanggal 5 dan 20.³⁰ Ketiga, pekerja tetap atau karyawan tetap. Para pekerja pabrik maupun perkebunan secara umum, menyebut diri mereka sebagai karyawan, bukan sebagai buruh.

Setelah kepemilikan Pabrik Gula Sragi berada di bawah negara Republik Indonesia, permasalahan yang terjadi dalam dinamika perpolitikan Indonesia juga secara tidak langsung berpengaruh pada Pabrik Gula Sragi. Salah satunya yaitu peristiwa Gestapu tahun 1965. Ada 2 serikat pekerja yang berpengaruh

besar terhadap kondisi ketenagakerjaan di Pabrik Gula Sragi sebelum era tahun 1965. Masing-masing adalah Serikat Buruh Gula (SBG) yang merupakan organisasi sayap kiri Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Kesatuan Buruh Gula (KBG) yang mewakili kepentingan golongan Marhaenis. Sebelum tahun 1965, SBG muncul sebagai kekuatan besar dalam Pabrik Gula Sragi. Begitu masuk ke pabrik gula seorang buruh akan langsung ditarik menjadi anggota SBG. Bagi yang tidak mau masuk menjadi anggota seringkali akan mengalami kesulitan dalam hal jenjang karirnya. Seiring terjadinya peristiwa Gestapu di tingkat pusat, PKI dan *onderbouw*-nya dibekukan kegiatannya dan dilarang keberadaannya. SBG pun kemudian menjadi sebuah organisasi yang terlarang.

KESIMPULAN

Pabrik Gula Sragi merupakan salah satu pabrik yang vital bagi industri gula Indonesia. Keberadaannya mampu memberikan dorongan kemajuan bagi perkembangan daerah Pekalongan sejak masa kolonial. Saat ini, Pabrik Gula Sragi merupakan satu-satunya pabrik gula yang masih aktif di Kabupaten Pekalongan.

Sejak didirikan pada tahun 1837, Pabrik Gula Sragi mengalami berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perubahan politik di Indonesia. Nasionalisasi terhadap Pabrik Gula Sragi dilakukan pada tahun 1957. Hal ini bermula ketika resolusi Indonesia yang disampaikan di depan sidang Majelis Umum

²⁹ Mubyarto, *Masalah Industri Gula di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), hlm. 17.

³⁰ Ilin Suryantono, *op. cit.*, hlm. 56.

PBB tahun 1957 mengenai permasalahan Irian Barat tidak mendapat dukungan.

Indonesia kemudian mengambil sikap tegas dengan membatalkan isi KMB, yang salah satu poinnya mengizinkan pihak-pihak swasta Belanda untuk tetap menjalankan kegiatan perekonomian di Indonesia. Setelah isi KMB tidak diakui, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih seluruh perusahaan Belanda yang ada di Indonesia.

Inisiatif nasionalisasi semula berasal dari rakyat, terutama yang terkait dengan pendukung parta-parti politik. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai yang paling banyak menggerakkan pendukungnya untuk melakukan pengambilalihan aset-aset Belanda tersebut. Akibatnya tumbuh perasaan atau sentimen anti Belanda pada rakyat Indonesia. Sentimen tersebut meluas hingga anti terhadap segala bentuk kepemilikan Belanda di Indonesia. Akibatnya ada aksi sepihak pengambilalihan aset-aset perusahaan Belanda, termasuk lahan usahanya. Untuk mengatasi kekasauan tersebut, maka pemerintah republik Indonesia turun tangan melakukan nasionalisasi aset-aset perusahaan asing. Tim eksekusi nasionalisasi ini adalah Taentara Nasional Indonesia atau TNI, terutama dari unsur Angkatan Darat.

Setelah dinasionalisasi, tidak ada kriteria khusus bagi pegawai Pabrik Gula Sragi. Persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja tergantung pada masing-masing bagian. Secara umum persyaratan tersebut meliputi usia (minimal telah mencapai 18 tahun), latar belakang

pendidikan yang dibutuhkan sesuai posisi yang dibutuhkan, serta spesifikasi keahlian.

Sejak pemerintah mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda, produksi gula secara nasional menurun. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya penurunan produktivitas usaha tani tebu, serta kurangnya tenaga ahli di pabrik-pabrik gula. Para manajer dan teknisi yang merupakan orang-orang Belanda telah kembali ke negaranya. Kepulangan para tenaga ahli dalam industri gula ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pabrik gula. Para pengganti karyawan di pabrik gula belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melanjutkan dan menjalankan produksi pabrik seperti sebelumnya.

Permasalahan lain yang timbul setelah nasionalisasi yaitu adanya upah kerja yang mencolok antara pegawai tetap dan buruh. Hal ini kemudian memicu dibentuknya organisasi buruh guna melindungi kepentingan mereka. Di Pabrik Sragi terdapat dua organisasi yaitu, Serikat Buruh Gula (SBG) yang menjadi kepanjangan tangan PKI dan Kesatuan Buruh Gula (KBG) yang mewakili kepentingan golongan Marhaenis. Sebelum tahun 1965, SBG muncul sebagai kekuatan besar dalam PG Sragi. Begitu masuk ke PG seorang buruh akan langsung ditarik menjadi anggota SBG. Namun setelah peristiwa Gestapu tahun 1965, SBG dianggap sebagai organisasi terlarang.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

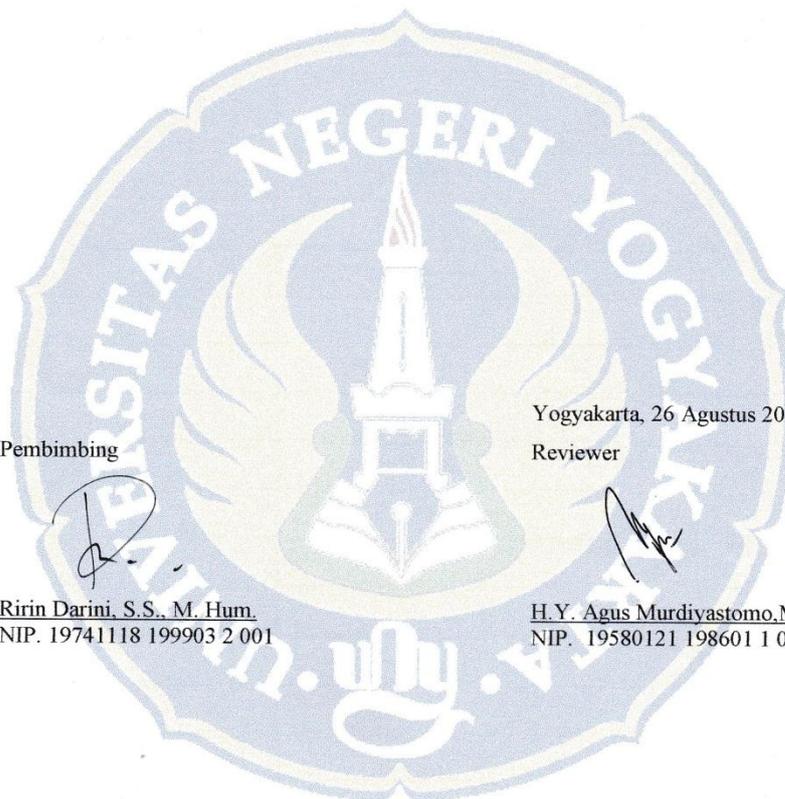
ANRI, "UU 86/1958, Nasionalisasi Perusahaan milik Belanda"

- Arsip Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (U2 No. 86 tahun 1958).*
- Arsip Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Gula Negara.*
- Arsip Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian / Perkebunan Milik Belanda Jang dikenakan Nasionalisasi.*
- Buku dan Artikel**
- Adisewojo, 1971, *Bertjotjok Tanam Tebu*, Bandung: Sumur, 1971.
- Ahmad Nashih Luthfi, dkk. *Kronik Agraria Indonesia*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, 2011.
- Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Boomgard, Peter, “Selayang Pandang Perkembangan Ekonomi dan Sosial Daerah Comal Periode 1750-1940”, dalam *Di Bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad ke-20*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Deerr, Noel, *The History of Sugar*, London: Chapman and Hall Ltd., 1949.
- Edi Cahyono, *Pekalongan 1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan*, Edi Cahyono’s Experience, 2005.
- Gottschalk, Louis, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, a.b. Nugroho Notosusanto, “*Mengerti Sejarah*”, Jakarta: UI Press, 1986.
- Helius Sjamsuddin dan H. Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1996.
- _____, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak 2007.
- Ilin Suryantono, “Kondisi Sosial Ekonomi Buruh Pabrik Gula Sragi Kabupaten Pekalongan Pasca G 30 S Tahun 1965 1998”, dalam *Paramita*, Vol. 20, No. 1, Januari 2010.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2005.
- Kusnin Asa, *Batik Pekalongan Dalam Lintasan Sejarah*, Pekalongan: Komunitas Pecinta Batik Pekalongan, 2006.
- Linblad, J. Thomas, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*, Jakarta : LP3S, 1998.
- Mubyarto, *Masalah Industri Gula di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- _____, dkk, *Tanah Dan Tenaga Kerja Perkebunan Di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- Raminah Baribin (dkk), *Geografi Dialek Bahasa Jawa, Kabupaten Pekalongan*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987.
- Suhartono, *Sejarah Berdirinya PTP XV-XVI*, Solo: Balai Pustaka, 1986.
- Tim Penyusun Sejarah Nasional, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta : Balai Pustaka, 2010.
- Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Dari Industri Gula Hingga Batik Pekalongan: Sejarah Sosial Ekonomi Pantai Utara Jawa pada Masa Kolonial Belanda*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017.

Wijanarko, N.B. dan Muryadi, "Nasionalisasi dan Dampaknya Terhadap Pabrik Gula Pajarakan 1956-1960", dalam *XI News*, No. 01, Tahun 01, 2015.

Retno Puji Lestari, "Nasionalisasi Industri Gula di Madiun: Pabrik Gula Pagottan, Kanigoro, dan Redjo Agung Baru Tahun 1950-1966", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Skripsi



Pembimbing

Ririn Darini, S.S., M. Hum.
NIP. 19741118 199903 2 001

Yogyakarta, 26 Agustus 2019

Reviewer

H.Y. Agus Murdiyastomo, M. Hum.
NIP. 19580121 198601 1 001